



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Ekonomi

Senin, 15 September 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. PEMERINTAH HARUS DUKUNG SEKTOR MARITIM (*Media Online Kompas*)
2. PARIWISATA MENJADI PILAR EKONOMI DUNIA (*Media Online Kompas*)
3. REGULASI NEGARA ASEAN PERSULIT EKSPANSI BANK NASIONAL (*Media Online Indonesia Finance Today*)
4. PEMERINTAH BARU BUTUH TAMBAHAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR Rp. 92,7 TRILIYUN (*Media Online Indonesia Finance Today*)

MEA 2015

Pemerintah Harus Dukung Sektor Maritim

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah harus mendukung penuh dan berkomitmen mengembangkan sektor maritim, termasuk industri di dalamnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Sektor kelautan tidak sekadar menjadi bagian sektor pangan, tetapi juga menjadi identitas politik, sosial budaya, dan kebanggaan Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI) Ady Surya yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (14/9). Menurut dia, pemerintah tidak boleh mengencilkan arti sektor maritim hanya sebagai bagian dari sektor pangan.

Ady memaparkan, pemerintah seharusnya mendukung penuh sektor maritim, apalagi dalam menghadapi MEA 2015. Jika tidak, Indonesia yang memiliki laut luas akan tertinggal dari negara-negara lain.

Industri pengalengan ikan se-

bagai bagian dari sektor maritim terus bersiap menghadapi MEA antara lain dengan menyiapkan sejumlah standardisasi. Sejak 1997, industri pengalengan ikan sudah menerapkan standar halal. Pada 2015, Standar Nasional Indonesia (SNI) juga akan diterapkan pada industri tersebut.

Saat ini, APIKI bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang membentuk lembaga untuk sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang pengalengan ikan. Hal itu untuk menghindarkan tenaga kerja Indonesia digusur oleh tenaga kerja asing yang bersertifikat.

Ady mencontohkan, salah satu perusahaan pengalengan ikan di Indonesia akhirnya mengambil tenaga kerja dari Thailand. Alasannya, pekerja dari Thailand dinilai memenuhi standar kompetensi.

Secara umum, produksi industri pengolahan ikan masih se-

kitar 56 persen dari kapasitas terpasang. Adapun produksi industri pengalengan ikan hanya 45 persen dari kapasitas terpasang.

"Artinya, masih ada 55 persen kapasitas yang belum dioptimalkan, tanpa harus membangun pabrik baru," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung sektor kelautan dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan memperkuat sistem distribusi logistik ikan. Pemerintah juga harus memodernisasi alat tangkap nelayan agar jangkauan kapal nelayan Indonesia lebih besar.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kesempatan terpisah mengatakan, pada 2016, sekitar 65 persen barang sudah diliberalisasi. Dalam 10 tahun mendatang, liberalisasi akan berlaku terhadap 80 persen barang industri. Karena itu, pasar dalam negeri harus diperkuat.

(WIE)

Pemerintah harus mendukung penuh dan berkomitmen mengembangkan sektor maritim, termasuk industri di dalamnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Sektor kelautan tidak sekadar menjadi bagian sektor pangan, tetapi juga menjadi identitas politik, sosial budaya, dan kebanggaan Indonesia

Hashtag Berita :

#MEA(MasyarakatEkonomiAsean) #KedaulatanMaritim

PARIWISATA MENJADI PILAR EKONOMI DUNIA

KOMPAS

Senin
15 September 2014

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Halaman 19
Kolom 6-7

PEREKONOMIAN

Pariwisata Menjadi Pilar Ekonomi Dunia

MAKAU, KOMPAS — Negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat mulai menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar perekonomiannya. Alasannya, di kawasan Asia Pasifik, pariwisata secara langsung telah menyumbang produk domestik bruto 3,4 persen dan secara tidak langsung 8-9 persen.

Di kawasan APEC, satu dari 11 pekerjaan diciptakan oleh pariwisata. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. "Jadi, bisa dipastikan sektor ini akan semakin berperan karena Tiongkok dan AS saja sudah mulai menjadikan pilar perekonomiannya," tutur Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu usai penutupan Pertemuan Ke-8 Menteri Pariwisata Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Sabtu (13/9), di Makau, Tiongkok.

Keseriusan Tiongkok menjadikan pariwisata salah satu pilar perekonomiannya disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok Wang Yan. Tekad untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar perekonomian, baik nasional maupun untuk APEC, akan disampaikan Wang Yan dalam Deklarasi Pemimpin Ekonomi APEC pada November mendatang.

Komitmen negara-negara APEC untuk menjadikan pariwisata pilar perekonomian dinyatakan dalam Deklarasi Makau sebagai hasil dari Pertemuan Ke-8 Menteri Pariwisata APEC.

Dalam deklarasi ditargetkan pada 2025 jumlah wisatawan mancanegara di kawasan Asia Pasifik mencapai 800 juta orang. Langkah lain adalah menetapkan target menyelesaikan Rencana Strategis Pariwisata APEC 2015-2019 pada tahun depan.

"Komitmen tersebut mengembirakan karena dengan kesadaran bersama menjadikan pariwisata sebagai pilar perekonomian APEC akan ada koordinasi dan diplomasi politik tingkat tinggi dalam membahas pariwisata," kata Mari yang bersama Wakil Perdana Menteri Tiongkok dipilih untuk menyampaikan sambutan mewakili seluruh de-

legasi pada pembukaan Pertemuan Ke-8 Menteri Pariwisata APEC.

Harus lebih fokus

Mari mengingatkan, keseriusan negara-negara seperti Tiongkok dan AS menjadikan pariwisata sebagai pilar perekonomian membuat Indonesia harus lebih fokus membangun sektor ini. "AS, misalnya, untuk pertama kalinya membentuk National Travel and Tourism Office untuk koordinasi antar-kementerian dan lembaga serta melaksanakan *brand AS*," kata Mari kepada wartawan *Kompas*, **Elly Roosita**, di Makau.

Tiongkok menunjuk Wakil Perdana Menteri Wang Yan sebagai koordinator pengembangan pariwisata antar-kementerian dan lembaga. Perdana Menteri Selandia Baru John Key merangkap portofolio pariwisata.

Di Filipina akan diselenggarakan koordinasi soal anggaran sehingga ada dana khusus infrastruktur pariwisata, memprioritaskan ekowisata, dan tidak memberikan izin pertambangan di wilayah pariwisata.

"Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Lintas Sektor untuk pengembangan pariwisata. Koordinasi lintas sektor itu dipimpin wakil presiden yang membawahi 13 kementerian dan lembaga," ujar Mari. Perpres Nomor 64 Tahun 2014 diterbitkan awal Agustus lalu.

"Perpres itu merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan ini langkah awal yang baik. Bahkan, yang lebih penting pada akhirnya adalah komitmen politik dan anggaran agar kontribusi pariwisata secara ekonomi dapat terealisasi," kata Mari.

Dalam Pertemuan Ke-8 Menteri Pariwisata APEC, delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral untuk meningkatkan kerja sama pariwisata dengan Kepala China National Tourism Administration Shao Qiwei, Duta Besar Australia untuk APEC Sam Gerowitch, dan Deputy Chief Executive, Science, and Innovation Selandia Baru Paul Stock.

Negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat mulai menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar perekonomiannya. Alasannya, di kawasan Asia Pasifik, pariwisata secara langsung telah menyumbang produk domestik bruto 3,4 persen dan secara tidak langsung 8-9 persen

Hashtag Berita :

#Industri #PertumbuhanEkonomiNasional #KementerianPariwisatadanEkonomiKreatif

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ift.co.id

DECIDE NOW

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499

idea
Bloomberg
Businessweek

INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 15 September 2014

Halaman 1, Kolom 1-5

Regulasi Negara ASEAN Persulit Ekspansi Bank Nasional

OJK menilai perbankan Indonesia bisa menggarap potensi pasar yang di negara ASEAN lain, terutama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

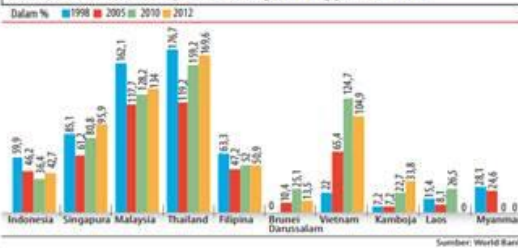
Rivki Maulana

JAKARTA - Regulasi di negara-negara Asia Tenggara yang tergolong dalam ASEAN mempersulit ekspansi bank nasional ke tataran regional. Menurut bankir, kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework/ABIF) yang bersifat multilateral tidak menjamin bank nasional bebas

berekspansi ke seluruh negara ASEAN, sebab izin ekspansi berlaku dalam tataran bilateral. Masalah regulasi ini membutuhkan kesepakatan di antara regulator negara-negara ASEAN. Sementara menunggu hasil negosiasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan di Indonesia menilai perbankan Indonesia bisa

menggarap potensi pasar yang di negara ASEAN lain, terutama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Muliawan D Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK, mengatakan regulasi perbankan di Indonesia lebih terbuka dibandingkan negara ASEAN lain. "Negara lain harusnya mengikuti Indonesia karena regulasi perbankan di sini sudah sangat terbuka. Pengaturan (batas kepemilikan saham) 40% itu tentu sangat sesuai dengan international compliance," jelas dia akhir pekan lalu.

Rasio Kredit terhadap PDB di Negara Anggota ASEAN



Sebagaimana diketahui, sejak 1999 investor asing boleh memiliki saham bank di Indonesia hingga 99%. Namun sejak 2012, regulator mulai mempersempit batas kepemilikan saham bank menjadi 40%. Selain itu, izin ekspansi juga diterapkan secara berjenjang sesuai kapasitas modal bank. Otoritas perbankan di Singapura dan Malaysia membatasi kepemilikan asing sebesar 20% dan penerapan izin berjenjang. Sementara di Laos, otoritas membekukan izin pembukaan cabang baru hingga 2016 terkait pembenahan sistem keuangan di negara tersebut. Muliawan menekankan, OJK akan lebih selektif dalam memberikan izin ekspansi bank asing dengan memprioritaskan asas resiproskal. Dia menambahkan, OJK akan memberikan izin selama otoritas perbankan dari negara asal investor juga membuka kesempatan yang sama bagi bank asal Indonesia untuk melakukan ekspansi di negara tersebut. OJK merinci beberapa kesepakatan perjanjian resiproskal, antara lain dengan otoritas di Singapura, Malaysia, Tiongkok, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Filipina. "Sikap otoritas negara lain sangat terbuka karena mereka lihat peluang di Indonesia sangat besar," jelas dia. Sebelum pemberlakuan ABIF pada 2020, OJK akan gear up merangkul otoritas perbankan di negara tetangga untuk merumus-

kan jumlah bank yang masuk dalam kategori Qualified ASEAN Bank (QAB), atau bank yang bebas melakukan ekspansi di ASEAN. "Di antara pendekatan multilateral, kami coba tuangkan dalam kesepakatan bilateral," kata dia. Terdapat enam bank asal Indonesia yang berpotensi menjadi QAB walau secara permodalan berada di bawah perbankan Singapura dan Malaysia. Muliawan mengklaim kompetensi dan daya saing bank asal Indonesia sejajar dengan negara ASEAN lain. "Mereka bisa berkompetisi sepanjang diberikan keleluasan untuk beroperasi di sana," tukas dia. Beberapa bank pemerintah, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT BNI Tbk (BNNI) menyatakan berminat melakukan ekspansi bisnis ke Vietnam di segmen korporasi. Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) ingin memperluas pasar kredit mikro ke regional. Pahala N Mansury, Direktur Keuangan & Strategi Bank Mandiri, mengatakan ruang ekspansi bagi bank berstatus QAB tidak boleh diskriminatif. Menurut dia, regulasi akan menjadi penghambat integrasi perbankan ASEAN jika ruang berkompetisi dibedakan antara bank lokal dengan bank asing.



Regulasi akan menjadi penghambat integrasi perbankan ASEAN jika ruang berkompetisi dibedakan antara bank lokal dengan bank asing.

hingga saat ini, beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura menerapkan aturan yang sangat ketat bagi bank asing. Misalnya, pembatasan jumlah cabang dan pernyataan modal lebih tinggi. **Bidik Korporasi** Bank Mandiri dan BNI sedang membidik segmen korporasi di Vietnam dan Myanmar. Royke Tunilasar, Direktur Treasury, Financial Institutions, & Special Asset Management Bank Mandiri, mengatakan bank tengah mengkaji regulasi industri perbankan di masing-masing negara untuk

menghitung model bisnis yang akan digarap. "Kami harus lihat dulu apakah diharuskan setor modal yang besar, kami juga kaji partnership dengan bank lokal yang ada di sana," ujar Royke. Menurut dia, potensi pasar yang bisa digarap di tiga negara tersebut, antara lain bisnis trade finance dan remittance. Bank Mandiri, menurut Royke, juga bisa menyalurkan kredit ke nasabah yang memiliki relasi bisnis dengan Indonesia. Saat ini banyak nasabah Bank Mandiri yang masuk ke Vietnam dan Myanmar, sebab ada pabrik semen dan properti.

Sebagaimana diketahui, perusahaan asal Indonesia yang berekspansi ke Vietnam antara lain PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) yang mengakuisisi perusahaan semen Vietnam, Tang Long Cement. Grup Ciputra juga telah membangun beberapa proyek properti di Hanoi, ibukota Vietnam antara lain Ciputra Hanoi International City seluas 301 hektare. Rahmat Hidayat, VP Global Payment & Overseas Network BNI, mengatakan bank akan menggandeng dua bank lokal Myanmar untuk ekspansi bisnis di sana. Dua bank tersebut adalah Kanbawza Bank dan Co-operative Bank Ltd. Menurut Rahmat, bank juga akan membuka kantor perwakilan bersama di Myanmar. "Ekspektasi kami November selesai, minggu depan kami ajukan suratnya ke Bank Sentral Myanmar," ujar dia. Kantor perwakilan perusahaan akan digunakan bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Semen Indonesia, dan PT Telekomunikasi Internasional (Telin), anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM).

Menurut Rahmat, BNI akan menggarap bisnis dari kegiatan usaha BUMN asal Indonesia di Myanmar. Namun, didapatkan dari transaksi ini akan dibuka kantor cabang Singapura. "Myanmar masih kena sanksi, orang asing belum mau berinteraksi dengan mereka sehingga transaksinya lewat Singapura," jelas dia.

Otoritas Jasa Keuangan perbankan Indonesia bisa menggarap potensi pasar yang di Negara ASEAN lain, terutama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam mempersulit ekspansi Bank Nasional ke tataran Regional

Hashtag Berita :
#Perbankan #StabilitasEkonomiNasional



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di www.ift.co.id

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499





INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 15 September 2014
Halaman 7, Kolom 1-5

Pemerintah Baru Butuh Tambahan Anggaran Infrastruktur Rp 92,7 Triliun



Rasio elektrifikasi setiap tahun harus naik sekitar 4% untuk mencapai rasio 100% pada 2019.



Program Infrastruktur Jokowi-JK

- I Infrastruktur dasar strategis
 - 1 Perbaikan jalur seketan Jawa
 - 2 Jalur penyebrangan ferry
 - 3 Penuntasan jalur strategis tol trans Jawa
 - 4 Perbaikan kualitas jalan lintas timur
 - 5 Trans Kalimantan dan Sulawesi
- II Bidang Konektivitas Laut
 - Tol laut (revitalisasi pelabuhan dan pembangunan kapal)
- III Bidang Kelistrikan
 - Investasi transmisi dan pembangkit
- IV Teknologi Informasi Komunikasi
 - 1 Menyediakan bandwidth 1 Gb per bulan per kapita
 - 2 Layanan e-government
 - 3 Pembangunan pusat industri kreatif nasional berbasis IT

Sumber: Tim Transisi

Salah satu isu strategis dalam visi misi presiden terpilih lima tahun ke depan adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 100% pada 2019.

Dusep Malik

JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan kebutuhan tambahan anggaran infrastruktur Rp 92,7 triliun tahun depan untuk mengkomodifikasi visi misi Presiden terpilih Joko Widodo. Tambahan tersebut di luar Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 teknokratik.

Dedy Supriadi Priyatna, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan perhitungan tambahan anggaran diperoleh setelah melihat beberapa sasaran pembangunan yang ingin dicapai presiden terpilih sesuai dengan visi dan misinya, namun belum masuk dalam perencanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Menurut Dedy, dalam RAPBN 2015 pemerintah telah mengalokasikan sektor infrastruktur sebesar Rp 143,9 triliun, setelah menambahkan proyek infrastruktur berdasarkan isu strategis presiden terpilih total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 236,6 triliun.

"Kalau melihat kebutuhan anggaran yang dilakukan pemerintah baru nanti sesuai visi misinya, terlihat ada gap dan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 92,7 triliun dari anggaran RAPBN 2015 yang hanya sebesar Rp 143,9 triliun. Kebutuhan tersebut di luar program tol laut yang diusulkan sebelumnya," ujar Dedy.

Dia mengungkapkan, salah satu isu strategis dalam visi misi presiden terpilih lima tahun ke depan adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 100% pada 2019, sedangkan saat ini rasio tersebut baru mencapai 81%. Berdasarkan hitungan tersebut, maka dalam lima tahun ke depan rasio elektrifikasi setiap tahun harus bertambah sekitar 4%.

Selain itu, isu strategis lain seperti peningkatan ketahanan air juga dibutuhkan seperti pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi seluas 71 ribu hektare, rawa seluas 39 ribu hektare, pembangunan lanjutan 21 waduk, sembilan waduk baru, pembangunan embung sebanyak 513 serta pengendalian banjir sepanjang 600 kilometer (Km).

Sedangkan untuk penguatan konektivitas nasional terdapat proyek strategis seperti preservasi jembatan sepanjang 0,652 meter, peningkatan kapasitas/pelebaran jalan sepanjang 1.237 km, penggantian jembatan sepanjang 2.296 meter, pembangunan jalan baru sepanjang 258 km, pembangunan fly

over atau underpass 2.044 meter dan jalan tol sepanjang 23,32 km.

Bambang Prihantoro, Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, menambahkan dari isu strategis bidang infrastruktur yang ada dalam visi misi presiden terpilih terlihat bahwa ada keinginan mendorong infrastruktur untuk membangun desa.

Infrastruktur tersebut lebih dititikberatkan untuk mendukung sektor pertanian seperti penyediaan pengairan untuk sawah di desa-desa dan peningkatan infrastruktur konektivitas untuk menopang sektor pertanian. Isu infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat pedesaan.

Adapun tambahan pembiayaan untuk membangun proyek strategis tersebut sampai dengan saat ini masih dalam pengkajian termasuk di dalamnya opsi kenaikan atau tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Kalau dari visi misinya terlihat bahwa presiden terpilih Joko Widodo ingin bangun desa, sehingga kami akan siapkan program apa yang ada di desa dan bagaimana kelembagaannya. Infrastruktur itu untuk dukung pertanian seperti irigasi dan transportasinya seperti angkutan pedesaan dan lain-lain," jelasnya kepada IFT.

Akbar Faisal, Deputi Tim Transisi Bidang Infrastruktur, sebelumnya mengungkapkan ada empat isu strategis bidang infrastruktur yang akan dikerjakan oleh pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo. Isu tersebut adalah infrastruktur dasar strategis, konektivitas laut, kelistrikan/energi, dan teknologi informasi komunikasi.

Empat isu strategis tersebut diakui tidak mudah dilaksanakan dalam waktu dekat melihat sempitnya ruang fiskal dalam RAPBN 2015. Karena itu, untuk mengerjakan proyek tersebut dibutuhkan akrobatik penganggaran dan beberapa kebijakan strategis. ■

Salah satu isu strategis dalam visi-misi Presiden terpilih lima tahun ke depan adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 100% pada 2019. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan tambahan Anggaran 2015

Hashtag Berita :

#RAPBN2015 #Infrastruktur #TransisiPemerintahan #RKP(RencanaKerjaPemerintah)